

# RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2021



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020



## KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat dan Karunia ALLAH SWT, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA-SKPD ) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun kedepan yang secara sistematis dan berkesinambungan. Aspek yang perlu dicermati berupa potensi, peluang dan kendala yang ada dan atau mungkin timbul. Keseluruhan proses ini akan menghasilkan suatu strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta aturan keberhasilan dalam kegagalan dalam pelaksanaan.

Penyajian RENJA SKPD ini kami rasa masih jauh dari sempurna, namun paling tidak dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya dan dengan kerendahan hati diharapkan adanya suatu saran serta masukan untuk kesempurnaan penyajian yang akan datang.

Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat diselesaikan penyusunan RENJA SKPD ini.

Koto Baru, Februari 2020



**ZULFAHMI, SH. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660325 199402 1 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPPKBP3A TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2015 Dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD	36
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV. PENUTUP	46



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja masing-masing SKPD.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

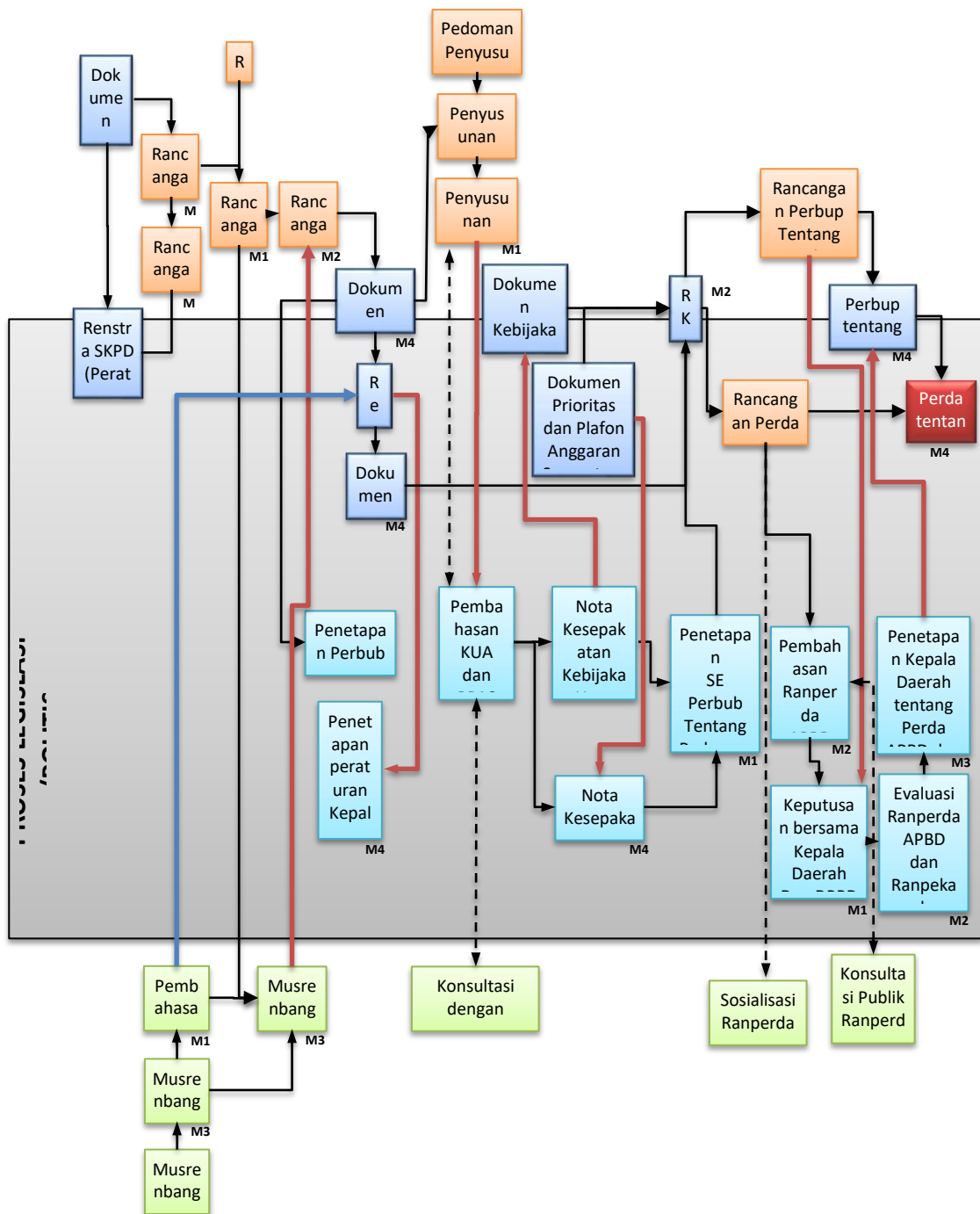
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2020 pada dasarnya adalah pengkomunikasian Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok di Bidang Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan selama kurun waktu tersebut. Rencana Kerja DPPKBP3A memuat program dan kegiatan prioritas, merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan

dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sebagai penjabaran dari RPJMD dan renstra SKPD, proses penyusunan Rencana Kerja SKPD harus berpedoman kepada kedua dokumen tersebut guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan masing-masing SKPD untuk menunjang capaian kinerja daerah sebagaimana termaktub didalam indikator kinerja pada RPJMD. Keterkaitan antara dokumen perencanaan adalah sebagai berikut :

## **BAGAN ALUR PENYUSUNAN RKPD, RENJA**

### **PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD**



Untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A Kabupaten Solok maka disusunlah Renja DPPKBP3A. Proses penyusunan Rencana Kerja DPPKBP3A tahun 2021 ini dilaksanakan melalui mekanisme / tahapan yang diawali dengan menampung usulan dan aspirasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan mulai dari Musrenbang Tingkat Nagari, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen ini mengacu kepada beberapa produk perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok 2010-2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

13. Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Isu-isu strategis yang berkaitan/selaras dengan Program Kependudukan dan KB antara lain : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan Pencapaian Target MDGs. Berkaitan dengan hal tersebut serta berdasarkan Indikator dan Target Kinerja yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2021 yang akan datang maka DPPKBP3A Kabupaten Solok sebagai institusi yang mengemban tugas menyukseskan program KB dan Kependudukan perlu menyelaraskan Visi dan Misinya dengan setidaknya mempertimbangkan tiga hal : **Pertama**, pasca disahkannya UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka DPPKBP3A Kabupaten Solok tidak lagi diamanatkan sebagai lembaga yang menangani KB semata, tetapi juga menangani masalah kependudukan. **Kedua**, dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan nasional di Kabupaten Solok dipandang perlu disusun perencanaan penganggaran yang responsive gender. **Ketiga** : Dalam rangka pencapaian target RPJMD dan Renstra SKPD maka dalam setiap pelaksanaan RENJA Tahunan DPPKBP3A, dimaksudkan untuk menjabarkan dan melaksanakan berbagai rencana strategis, rencana aksi, dan program-program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok sekaligus starting point sebagai dasar pijakan dan berguna sebagai bahan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, penyusunan Renja ini dilakukan dengan memperhatikan capaian hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, ketersediaan sumber daya, isu strategis, sinergitas antar urusan, antar wilayah serta lintas sektor, lintas SKPD, serta kegiatan pendukung yang menjadi tupoksi SKPD dalam kerangka pencapaian



Visi Kabupaten Solok : “ **Terwujudnya pemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera**”. DPPKBP3A Kabupaten Solok merupakan pengejawantahan mandat yang diberikan untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Program KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan KB PP mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan Daerah, penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan.

Penyusunan Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Renja DPPKBP3A Tahun 2020 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2021 ini harus menampung dan mempunyai kemampuan dalam mewujudkan sasaran pembangunan kependudukan dan KB sekaligus menjadi program prioritas di Kabupaten Solok.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

RENJA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok Tahun 2021 pada dasarnya adalah pengkomunikasian Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok di bidang Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan selama kurun waktu



tersebut. Penyusunan RENJA ini dimulai dengan menjelaskan Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran serta Dasar Hukum. Selanjutnya menjelaskan gambaran umum/Profil SKPD, Data Sasaran dan Capaian Kinerja SKPD tahun sebelumnya. Pada Bab-bab selanjutnya akan membahas tentang Isu-isu strategis, Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang dijalankan SKPD DPPKBP3A, uraian matrik program dan kegiatan yang disandingkan Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD. Dengan demikian penyajian RENJA Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I           PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**Bab II           EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBP3A, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

**BAB III       TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.

**BAB IV       RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Menjelaskan Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021.

**BAB V       PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahun 2021.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**

#### **DPPKBP3A TAHUN LALU**

##### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah DPPKBP3A Kabupaten Solok yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh DPPKBP3A beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, mencakup visi, misi tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Renstra di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD setiap tahunnya. Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama Tahun 2020 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya. Berdasarkan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan, secara umum kinerja DPPKBP3A Tahun 2019 mampu mencapai target meskipun pada beberapa sasaran hasilnya kurang sebagaimana yang diharapkan.



Sesuai dengan visi dan misi DPPKBP3A Kabupaten Solok, DPPKBP3A pada Tahun 2020 telah merencanakan dan melaksanakan 13 Program dan 30 Kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2020. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPPKBP3A Tahun 2019 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DPPKBP3A Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :



**TABEL . II.2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra**  
**SKPD s/d Tahun 2020 ( Tahun Berjalan )\* Kabupaten Solok**

**Nama SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kode Rekening						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan ( output)	Volume/ Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Rekapitulasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2020)	
											Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10=(6+8)	11=(10/5)
1	02	08	01	01		<b>Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran dengan baik</b>								
1	02	08	01	01	01	Penyediaan Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1



1	02	08	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	300	300	-	-	-	300	1
1	02	08	01	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	500	400	100	100	1	500	1
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
1	02	08	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	500	400	100	100	1	500	1
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM</b>							-	
1	02	08	01	05	07	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	%	500	400	100	100	1	500	1
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku</b>							-	
1	02	08	01	06	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Monev Kegiatan DPPKB3A Yang Dilaksanakan	%	100	100	-	-	-	100	1
1	02	08	01	06	09	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01			<b>Program Penyusunan, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian SPM dan SOP</b>	<b>Jumlah SPM dan SOP yang disusun</b>							-	
1	02	01				Penyusunan, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian SPM dan SOP	Persentase Kepuasan Publik/ Aparatur terhadap pelayanan dan pengelolaan administrasi di setiap SKPD	%	100	100	100	100	1	200	2
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>15</b>		<b>Program Keluarga Berencana</b>									
1	02	08	01	15	02	Pelayanan KIE	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	15	05	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	15	07	Jambore Institusi Masyarakat	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan	%	400	400	-	-	-	400	1
1	02	08	01	15	07	Penilaian dan Penghargaan Untuk Institusi Masyarakat Pengelola KB dan Kelompok Kegiatan	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan	%	200	200	-	-	-	200	1



2	02	08	01	16		Pembinaan Tenaga Pendukung Pelaksana Operasional POSDAYA di Kecamatan	Terwujud peningkatan kapasitas pengurus dan penguatan kelembagaan POSDAYA	%	100	100	-	-	-	100	1
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>								-	
1	02	08	01	16	01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase Kesehatan Reproduksi Remaja	%	300	300	-	-	-	300	1
1	02	08	01	16	02	Memperkuat dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Kesehatan Reproduksi Remaja	%	100	100	-	-	-	100	1
1	02	08	01	16	05	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Reproduksi Remaja	Persentase Kesehatan Reproduksi Remaja	%	200	200	-	-	-	200	1
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>17</b>		<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>								-	
1	02	08	01	17	02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	Persentase Pelayanan Kontrasepsi	%	500	400	100	100	1	500	1
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Program Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri</b>								-	
1	02	08	01	18	01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Persentase Pembinaan dan Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	%	300	300	-	-	-	300	1
1	02	08	01	18	02	Pendataan Keluarga	Persentase Pembinaan dan Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	%	500	400	100	100	1	500	1
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>19</b>		<b>Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</b>								-	
1	02	08	01	18	02	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Persentase Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Yang Dilaksanakan	%	100	100	-	-	-	100	1
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>20</b>		<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>									
1	02	08	01	20	02	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah	Persentase Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Yang Dilaksanakan	%	400	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	20	04	Penyediaan Sarana Kerja PKB	Persentase Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Yang Dilaksanakan	%	500	400	100	100	1	500	1
1	02	08	01	20	05	Pertemuan Ajang Kreatifitas Remaja Melalui Saka Kencana	Persentase Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Yang Dilaksanakan	%	200	200	100	100	1	300	1
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>21</b>		<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>									
1	02	08	01	21	01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Persentase Penyuluhan Narkoba, PMS JIV/Aids Yang Dilaksanakan	%	200	200	-	-	-	200	1

1	02	08	01	23		<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan</b>									-	
1	02	08	01	23	01	Pelatihan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan	Persentase Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Yang Dilaksanakan	%	500	500	100	100	1	600	1	
1	02	08	01	15		<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>									-	
1	02	08	01	15	02	Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik dan Jabatan Publik	Persentase Kualitas Anak dan Perempuan Yang Ditingkatkan	%	300	300	-	-	-	300	1	
1	02	08	01	15	03	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kualitas Anak dan Perempuan Yang Ditingkatkan	5	500	400	100	100	1	600	1	
1	02	08	01	16		<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>									-	
1	02	08	01	16	02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Persentase Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	300	300	-	-	-	300	1	
1	02	08	01	16	10	Penyusunan dan Pengolahan Data Analisa Perspektif Gender	Persentase Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	200	200	-	-	-	200	1	
1	02	08	01	17		<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>									-	
1	02	08	01	17	01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah	Persentase Perempuan dan Anak yang Terlindungi	%	400	400	100	100	1	500	1	
1	02	08	01	17	08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Persentase Perempuan dan Anak yang Terlindungi	%	200	200	100	100	1	300	1	
1	02	08	01	18		<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>									-	
1	02	08	01	18	01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Persentase Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Yang Ditingkatkan	%	500	500	100	100	1	600	1	
1	02	08	01	18	03	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Persentase Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Yang Ditingkatkan	%	400	400	100	100	1	500	1	
1	02	08	01	18	07	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Persentase Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Yang Ditingkatkan	%	400	400	100	100	1	500	1	



Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja SKPD pada tahun 2020 mencapai 100%, akan tetapi jika dilihat dari tingkat capaian realisasi target Renstra masih ada program dan kegiatan yang realisasinya harus ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dimaklumi karena ini merupakan capaian kinerja SKPD sampai dengan tahun ke 5 (lima) dari pelaksanaan Renstra SKPD. Meskipun demikian dari analisis awal pada pelaksanaan Renstra tahun berjalan s/d 2020 dapat diketahui beberapa penyebab masih rendahnya capaian kinerja DPPKBP3A tersebut. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sebagaimana tabel di atas adalah sebagai berikut :

- Rendahnya capaian kinerja dari target ini disebabkan karena tidak ada program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD daerah yang dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ini, karena tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut.
- Intervensi program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan kurang maksimal. Perlu dilakukan suatu intervensi dengan membuat program yang dapat dipakai untuk meningkatkan status kesejahteraan para keluarga ke tingkat yang lebih tinggi.
- Kesenjangan kompetensi SDM aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yang disebabkan adanya kebijakan *zero growth* terhadap pengadaan pegawai baru selama kurang lebih 15 tahun (1996-sekarang). Selanjutnya Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menyebabkan tidak fokusnya kelembagaan yang menangani Program KB Nasional di tingkat Kabupaten.
- Belum sinkronnya kebijakan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, secara tegas memberi perintah pada Pemerintah Daerah untuk mengambil peran yang signifikan. Pasal 3 UU itu menyebutkan bahwa

kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan yang dijalankan dengan partisipasi semua pihak secara gotong royong. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyikapi melalui Peraturan Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana, sesuai amanat Undang-undang Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

- Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program KB di Kabupaten yang kurang memadai, dengan demikian, Dinas PPKB dan P3A harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan kependudukan dan KB menjadi program prioritas di daerah.
- Masih rendahnya kapasitas Institusi KB di tingkat lapangan, untuk itu perlu dilakukan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Nagari (PPKBN) dan Sub-PPKBN, mereka ini diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Perencanaan pelayanan SKPD DPPKBP3A Tahun 2019 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pelayanan di daerah. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Keberhasilan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah kependudukan Kabupaten Solok saat ini, dan telah menunjukkan hasil – hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan Tahun 2019 telah



terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Solok berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk SPM ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok memiliki dua acuan yaitu ; 1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010, dan 2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor : 01 Tahun 2010. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir

**TABEL II.2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOLOK**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SPM / Standar Nasional	IKK	Volume/ Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	9	12	13	14	9	16
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase SPM dan SOP yang disusun			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kepuasan Publik/ Aparatur terhadap pelayanan dan pengelolaan administrasi di setiap SKPD			%	-	≥80	-	-	-	≥80	-	-	-	≥80	-	-	
8	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DAK Non Fisik
10	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Program Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan			%	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	
12	Persentase Kesehatan Reproduksi Remaja			%	100	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100	-	
13	Persentase Kesehatan Reproduksi Remaja			%	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	



14	Persentase Kesehatan Reproduksi Remaja			%	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	
15	Persentase Pelayanan Kontrasepsi			%	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	
16	Persentase Pembinaan dan Pelayanan KB/KR Yang Mandiri			%	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	
17	Persentase Pembinaan dan Pelayanan KB/KR Yang Mandiri			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
18	Persentase Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Yang Dilaksanakan			%	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	
19	Persentase Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Yang Dilaksanakan			%	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100	-	100	
20	Persentase Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Yang Dilaksanakan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		DAK Fisik
21	Persentase Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Yang Dilaksanakan			%	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	
22	Persentase Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
23	Persentase Kualitas Anak dan Perempuan Yang Ditingkatkan			%	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100	-	100	
24	Persentase Kualitas Anak dan Perempuan Yang Ditingkatkan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
25	Persentase Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			%	100	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100	-	
26	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak			%	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100	-	100	
27	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak			%	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	
28	Persentase Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Yang Ditingkatkan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
29	Persentase Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Yang Ditingkatkan			%	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100	-	100	
30	Persentase Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Yang Ditingkatkan			%	-	100	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100	

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

### 2.3.1. Tinjauan terhadap Sinergitas Program

Isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting di Indonesia seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri. Dinamika dan kompleksitas kependudukan, seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk, tingginya angka kematian bayi atau ibu melahirkan, perubahan struktur umur, pergerakan penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan pemangku kepentingannya. Semua itu selain disebabkan oleh cukup banyak faktor yang kompleks, juga mendorong terjadinya berbagai persoalan yang kompleks pula, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Diperlukan kebijakan pembangunan dan kependudukan yang integratif untuk mengendalikan kuantitas dan persebaran serta memperbaiki kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya.

Ada perubahan signifikan terkait visi misi program KB pasca pemberlakuan UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang disahkan di Jakarta oleh Presiden RI, 29 Oktober 2009 lalu. Perubahan dimaksud adalah perubahan visi dan misi program KB dari "Seluruh Keluarga Ikut KB" dan "Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera" menjadi "**Penduduk Tumbuh Seimbang 2017**" dan "**Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera**". Terkait dengan visi misi tersebut, tampak sekali bahwa ada upaya sinergitas pembangunan program KB dengan pembangunan kependudukan yang belakangan ini tidak tertangani secara baik karena tidak adanya lembaga yang menangani masalah penduduk.

Melalui visi Penduduk Tumbuh Seimbang 2015, pemerintah berkeinginan mengendalikan kuantitas penduduk yang saat ini dirasa

sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa menurut Sensus Penduduk 2017, Indonesia tidak hanya menduduki ranking empat dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat, tetapi juga memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 1,49 persen per tahun atau dalam hitungan absolut terdapat penambahan sekitar 4 juta jiwa per tahun yang kurang lebih setara dengan jumlah penduduk Singapura pada saat ini. Keinginan ini ditandai dengan penetapan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Renstra Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional Tahun 2010-2014, yakni terkendalinya jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang ditandai *Total Fertility Rate* (TFR) = 2,1 dan *Net Reproduction Rate* (NRR) = 1.

Sudah barang tentu perhatian pemerintah tidak hanya persoalan kuantitas penduduk saja, tetapi juga menyangkut kualitas. Hal ini tercermin dari salah satu misi pembangunan KB saat ini yakni mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya *Millenium Development Goals* (MDGs) yang saat ini belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan.

Pembangunan berwawasan kependudukan sendiri memiliki dua makna. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek pembangunan. Artinya pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Kedua, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Dengan demikian, dalam pembangunan berwawasan kependudukan akan menempatkan penduduk sebagai fokus dari upaya pembangunan sekaligus mendorong partisipasi penduduk dalam pembangunan yang berlandaskan asas kebersamaan dan gotong royong.



Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan salah satu Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam banyak hal, perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun masih cukup jauh dari pencapaian kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender merupakan hambatan utama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, meningkatnya keadilan gender merupakan hal yang secara ekonomi masuk akal. Mengarusutamakan masalah-masalah gender ke dalam inisiatif, strategi, kebijakan, sasaran dan target pembangunan memerlukan pengertian menyeluruh atas konteks dinamika gender.

Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional penting yang menganut prinsip-prinsip kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah untuk 2004-2009 mengidentifikasi pengarusutamaan gender sebagai target di bawah tema Membangun Indonesia yang Adil dan Demokratis. Instrumen-instrumen pengarusutamaan gender termasuk Instruksi Presiden yang dikeluarkan tahun 2000 dan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk pengarusutamaan gender yang diterbitkan tahun 2002. Pencapaian telah terlihat, termasuk penyusunan statistik data terpilah di beberapa propinsi, kabupaten dan kecamatan, penerapan Alur Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) di beberapa kementerian, serta peningkatan permasalahan gender yang dicakup ke dalam rencana pembangunan tahunan pada tingkat kabupaten. Namun demikian, masih banyak hal yang harus dilakukan. Masih sering terdapat kekurangpahaman yang mendasar atas manfaat dan pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program. Masalah gender masih dipandang sebagai masalah sosial semata dan tidak memiliki konsekuensi ekonomi. Unit pemberdayaan perempuan cenderung kekurangan staf dan sumberdaya, serta tidak ditempatkan secara strategis dalam struktur pemerintahan. Organisasi organisasi masyarakat madani mempunyai peran penting untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Transformasi politik menuju otonomi daerah memiliki potensi untuk melakukan perubahan besar di Indonesia. Desentralisasi bertujuan membawa pemerintah lebih dekat pada rakyat. Salah satu kecenderungan yang paling positif adalah meningkatnya kesadaran rakyat bahwa mereka dapat dan harus berperan serta dalam pemerintahan daerah. Namun demikian, desentralisasi juga diikuti oleh berbagai bentuk tantangan dan kesempatan bagi perempuan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut termasuk keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan yang pada umumnya masih terbatas. Di beberapa wilayah, desentralisasi dikhawatirkan diikuti oleh bangkitnya kembali penafsiran yang konservatif terhadap agama mengenai peran gender dan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif.

Namun demikian, terdapat juga peluang-peluang yang menjanjikan. Beberapa pemerintah daerah telah mulai memandang perempuan sebagai pihak terkait yang penting dan secara aktif membuat program program untuk mempromosikan hak-hak perempuan. Pemerintah daerah lainnya memanfaatkan media (talk show lewat radio dan sebagainya) untuk mempromosikan kepentingan perempuan. Penyerahan proses anggaran kepada pemerintah daerah dalam beberapa kasus membuka peluang bagi partisipasi lebih besar dari warga, termasuk perempuan, dan menghasilkan anggaran yang lebih responsif terhadap gender. Banyak pemerintah daerah telah memperlihatkan kemauan politik untuk mengadopsi proses pembuatan kebijakan secara partisipatif, mengarusutamakan gender dan mengembangkan kapasitas melalui pelatihan mengenai masalah-masalah gender untuk para pejabat pemerintah daerah

### **2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi**

#### **1. Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk.**

Jumlah penduduk Kabupaten Solok dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya dapat dikendalikan

sehingga semakin menurun. Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan antara lain :

- a. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang rendah
- b. Usia peserta KB yang relatif tua
- c. Usia rata-rata wanita kawin pertama menurun

## **2. Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk.**

Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Secara umum memang terjadi Penurunan TFR antara lain karena meningkatnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi (prevalensi) pada pasangan usia subur. Kecenderungan meningkatnya angka prevalensi merupakan hasil dari peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta ketersediaan alat kontrasepsi. Dengan demikian angka prevalensi perlu terus ditingkatkan agar angka kelahiran terkendali sehingga dapat mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang. Oleh karena itu peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, dan penyediaan alat kontrasepsi menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kelahiran.

## **3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.**

Sebagian besar masyarakat, orang tua, maupun remaja belum memahami hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah dan tidak tepat. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Para anak dan remaja lebih merasa nyaman mendiskusikannya secara terbuka dengan sesama teman. Pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang menganggap pembahasan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu justru lebih populer. Sementara itu, pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih terbatas jangkauannya dan belum



memuaskan mutunya. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah belum sepenuhnya berhasil. Semua ini mengakibatkan banyaknya remaja yang kurang memahami atau mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang masalah kesehatan reproduksi. Pemahaman yang tidak benar tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi ini menyebabkan banyaknya remaja yang berperilaku menyimpang tanpa menyadari akibatnya terhadap kesehatan reproduksi mereka.

**4. Masih rendahnya usia kawin pertama penduduk.**

Usia kawin pertama yang rendah juga berkaitan dengan faktor sosial ekonomi penduduk, terutama pendidikan. Di samping itu sebagian kelompok masyarakat dan keluarga belum menerima dan menghayati norma keluarga kecil sebagai landasan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

**5. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.**

Kabupaten Solok telah mulai melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender dalam hal KB. Namun demikian, partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah yaitu sekitar 2 persen. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pula, penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi masih belum mantap dalam memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender.

**6. Masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB.**

Saat ini belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi. Sesuai dengan kesepakatan internasional, ICPD (*International Conference on Population and Development*) 1994, pada tahun 2015, semua pelayanan kesehatan primer harus dapat melayani KB. Di samping itu, masih banyak pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang.

**7. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga.**

Kondisi lemahnya ekonomi keluarga mempengaruhi daya beli termasuk kemampuan membeli alat dan obat kontrasepsi. Keluarga miskin pada umumnya mempunyai anggota keluarga cukup banyak. Kemiskinan menjadikan mereka relatif tidak memiliki akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya. Pada gilirannya, kemiskinan akan semakin memperburuk keadaan sosial ekonomi keluarga miskin tersebut. Demikian pula, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembinaanketahanan keluarga, terutama pembinaan tumbuh-kembang anak, masih lemah. Hal di atas akan menghambat pembentukan keluarga kecil yang berkualitas.

**8. Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB.**

Salah satu isu penting bagi kelangsungan pembangunan keluarga berencana adalah desentralisasi. Sesuai dengan Kepres Nomor. 103/2001, yang kemudian diubah menjadi Kepres Nomor. 9/2004, bahwa sebagian kewenangan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya peraturan tersebut, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan KB sampai saat ini adalah belum seluruh pemerintah kabupaten/kota menetapkan KB sebagai isu strategis dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemenuhan hak-hak reproduksi penduduk. Pemahaman bahwa pelayanan KB merupakan salah satu hak azasi manusia, yaitu hak rakyat untuk mengatur proses reproduksinya, masih rendah. Pembangunan KB juga belum dipandang sebagai suatu investasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Komitmen Kabupaten Solok dalam Program KB belum diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai, khususnya untuk mendukung operasional lini lapangan. Jumlah dan kualitas petugas lapangan menurun, karena PLKB lama dimutasi ke tempat lain, penggantian dengan CPNS baru tidak seperti yang diharapkan sehingga ratio PLKB/nagari masih jauh dari 1 PLKB per nagari.

## 9. **Gender dan Desentralisasi**

Transformasi politik menuju otonomi daerah memiliki potensi untuk melakukan perubahan besar di Indonesia. Desentralisasi bertujuan membawa pemerintah lebih dekat pada rakyat. Salah satu kecenderungan yang paling positif adalah meningkatnya kesadaran rakyat bahwa mereka dapat dan harus berperan serta dalam pemerintahan daerah. Namun demikian, desentralisasi juga diikuti oleh berbagai bentuk tantangan dan kesempatan bagi perempuan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut termasuk keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan yang pada umumnya masih terbatas.

## 10. **Suara Perempuan dalam Politik dan Pembuatan Keputusan**

Di masa Orde Baru, partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia sangat rendah. Tahun-tahun belakangan telah terlihat adanya perubahan, khususnya dalam pemilu 2004. Kuota lunak 30% telah diberikan bagi perempuan dalam perekrutan anggota partai politik. Walaupun tidak semua partai politik memenuhi target dan tidak ada yang menempatkan perempuan lebih tinggi dari lelaki dalam daftar partai, wacana tentang perlunya meningkatkan partisipasi politik perempuan telah mencapai tingkatan yang baru. Sebagai hasilnya, terdapat sedikit kenaikan jumlah perempuan yang terpilih untuk jabatan politik. Ini baru permulaan, namun jalan panjang masih terbentang. Tantangan yang signifikan adalah terbatasnya pelatihan dan pengalaman politik dari banyak perempuan yang bersaing dalam berbagai pemilihan. Persepsi peran perempuan dalam masyarakat juga merupakan penghambat. Dewan Perwakilan Rakyat hanya diisi oleh 11% perempuan (62 dari 549 anggota) dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), perempuan hanya mengisi 21% dari posisi yang ada (27 dari 128) dan Indonesia tidak memiliki gubernur perempuan.

## 11. **Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan Terhadap Perempuan telah merusak banyak kehidupan. Terlepas dari cedera fisik langsung, korban kekerasan juga



menderita cacat emosional dan psikologis yang lebih sulit untuk ditangani. Kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk, (i) kekerasan dalam rumah tangga, (ii) kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik dan paskakonflik, serta (iii) perdagangan manusia. Perdagangan manusia berhubungan erat dengan migrasi tidak resmi dan mempengaruhi banyak perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan sebagai tenaga kerja. Dengan alasan-alasan yang nyata, bentuk perbudakan moderen ini sangat sulit untuk didokumentasikan, namun terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa isu ini merupakan masalah yang signifikan. Dalam banyak kasus, kekerasan dianggap sebagai masalah pribadi ketimbang masalah publik. Tantangan kedua adalah sumberdaya dana dan manusia yang digunakan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan pada umumnya tidak memadai untuk memastikan bahwa para korban dapat diberikan bantuan yang mereka butuhkan dan yang menjadi hak mereka.

### **2.3.3. Formulasi isu-isu penting dan catatan strategis untuk perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan**

Secara umum DPPKBP3A telah merumuskan permasalahan pembangunan keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

#### **A. Urusan Keluarga Berencana (KB)**

1. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan
2. PUS yang ingin menunda kehamilannya sampai lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi (*Unmet-Need*) yaitu kelompok-kelompok yang membutuhkan alat kontrasepsi tapi tidak dapat terlayani, masih tinggi yaitu sebesar 10,8 %.
3. Masih kurangnya perhatian stakeholder terhadap remaja sehingga tidak adanya keberpihakan anggaran untuk kesehatan

reproduksi remaja sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja.

4. Tingginya angka kenakalan remaja ( sek bebas, HIV/AIDS dan NAPZA ), sedangkan wadah yang akan menampung, mengarahkan dan membimbing remaja untuk menjadi remaja yang sehat dan tegar remaja ( PIK-Remaja ) hanya hanya ada di 32 sekolah, dan 3 Karang Taruna, sehingga, tidak semua remaja dapat dijangkau oleh PIK- Remaja yang ada.
5. Era Globalisasi telah masuk sampai ke pelosok daerah yang sangat terpencil melalui elektronik dan digital, untuk itu perlu dilakukan antisipasi baik melalui kegiatan PIK-Remaja atau promosi kesehatan remaja melalui ( spanduk, pamflet, binder, kalender, dll ) serta menambah jumlah pendidik sebaya dan konselor sebaya di setiap PIK-Remaja.
6. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif.
7. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pria dalam ber-KB
8. Masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB
9. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi.
10. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
11. Jumlah keluarga miskin, KK yang termasuk dalam katagori prasejahtera dan sejahtera-1 masih tinggi
12. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.

## **B. Urusan Pemberdayaan Perempuan**

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
3. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan.
4. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender
5. Belum optimalnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada.
6. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal
7. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan.
8. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan hukum.
9. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenaga kerjaan yaitu di legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta.
10. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak serta KDRT.
11. Peraturan perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.



12. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah.
13. Belum optimalnya penanganan kekerasan kerasan perempuan, anak, KDRT, serta Penanganan kasus-kasus permasalahan anak.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas PPKB dan P3A di Tingkat Kabupaten berfungsi dalam pengejawantahan kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Solok. Dengan mempertimbangkan hal di atas, penyusunan Renja DPPKBP3A Tahun 2019 ini mesti dengan cermat mengakomodir program-program dan kegiatan yang bisa mewujudkan keinginan tersebut sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan /prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan Tahun 2020 yang akan dilakukan oleh SKPD dibandingkan dengan Rancangan RKPD Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

**Tabel II 2.4**  
**Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020**  
**Kabupaten Solok**

**Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

No	Program Dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program Dan Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>526.574.835</b>	<b>Pelayanan Administrasi perkantoran</b>				<b>633.325.085</b>	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	1.200.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	1.200.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	26.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBP3A	Tersedianya Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	100%	26.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	42.600.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	40.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	40.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	100%	1.800.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	100%	1.800.000	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	30.802.585	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	30.802.585	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKBP3A	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	14.000.000	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKBP3A	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	14.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	3.000.000	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	3.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	42.600.000	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	100%	78.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKBP3A		100%	33.000.000	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKBP3A	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	100%	33.000.000	
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKBP3A	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	172.000.000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKBP3A	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah	100%	176.922.500	
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	DPPKBP3A	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	230.000.000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	DPPKBP3A	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	228.600.000	

<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>353.640.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>357.140.000</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKBP3A	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	121.420.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKBP3A	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100%	121.420.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBP3A	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	225.720.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBP3A	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	225.720.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	6.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur	100%	10.000.000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>15.575.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>20.000.000</b>
	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	DPPKBP3A	Terselenggaranya Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	15.575.000	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	DPPKBP3A	Terselenggaranya peningkatan sumber daya aparatur	10 Orang	20.000.000
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>54.872.950</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>125.000.000</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPPKBP3A	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Dinas	100%	-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPPKBP3A	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Dinas	100%	50.000.000
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPPKBP3A	Terpenuhinya Laporan Keuangan dan Realisasi Kinerja	8 Dokumen	54.872.950	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPPKBP3A	Terpenuhinya Laporan Keuangan dan Realisasi Kinerja	8 Dokumen	75.000.000
<b>5</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>				<b>18.700.000</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>				<b>18.700.000</b>
	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Solok	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Dengan Kesetaraan gender pada SKPD	26 SKPD	18.700.000	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Solok	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Dengan Kesetaraan gender pada SKPD	26 OPD	18.700.000
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>				<b>111.890.000</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>				<b>112.240.000</b>
	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak di Daerah	Kab. Solok	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah	62 Orang	27.090.000	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak di Daerah	Kab. Solok	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah	62 Orang	27.240.000
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	DPPKBP3A	Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100%	84.800.000	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Kab Solok	Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100%	85.000.000
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>				<b>368.090.000</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>				<b>368.240.000</b>
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Solok	Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Organisasi Perempuan	1 Tahun	320.000.000	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Solok	Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Organisasi Perempuan	1 Tahun	628.712.500



	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Kab.Solok	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Ttangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	2 Nagari	20.850.000	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Kab.Solok	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Ttangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	2 Nagari	21.000.000	
	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Kab.Solok	Terlaksananya Penguatan PUG dan Anak	5 Klaster	27.240.000	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Kab.Solok	Terlaksananya Penguatan PUG dan Anak	5 Klaster	27.240.000	
<b>9</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>				<b>3.747.270.000</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>				<b>3,766.320.000</b>	
	Pelayanan KIE	Kab. Solok	Terlaksananya Pelayanan KIE	14 Kecamatan	81.050.000	Pelayanan KIE	Kab. Solok	Terlaksananya Pelayanan KIE	14 Kecamatan	100.100.000	
	Pembinaan Keluarga Berencana	Kab. Solok	Terlaksananya Pembinaan keluarga Berencana	14 Balai Penyuluh	3.666.220.000	Pembinaan Keluarga Berencana	Kab. Solok	Terlaksananya Pembinaan keluarga Berencana	14 Balai Penyuluh	3.666.220.000	DAK Non Fisik
<b>10</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>				<b>99.250.000</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>				<b>99.450.000</b>	
	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Kab. Solok	Terlaksana Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	7.000	99.250.000	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Kab. Solok	Terlaksana Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	7.000	99.450.000	
<b>11</b>	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR Yang Mandiri</b>				<b>65.000.000</b>	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR Yang Mandiri</b>				<b>65.000.000</b>	
	Pendataan Keluarga	Kab. Solok	Tersedianya Data Basis Keluarga	1 Dokumen	65.000.000	Pendataan Keluarga	Kab. Solok	Tersedianya Data Basis Keluarga	1 Dokumen	65.000.000	
<b>12</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>				<b>1.155.200.000</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>				<b>11.155.350.000</b>	
	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah	Kab. Solok	Terlaksananya Pemilihan Duta Gendre	35 PIK R	13.000.000	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah	Kab. Solok	Terlaksananya Pemilihan Duta Gendre	35 PIK R	13.000.000	
	Penyediaan Sarana Kerja PKB	Kab. Solok	Tersedianya Sarana Kerja PKB	3 Paket	1.104.000.000	Penyediaan Sarana Kerja PKB	Kab. Solok	Tersedianya Sarana Kerja PKB	5 Paket	1.104.000.000	DAK Fisik
	Pertemuan Ajang Kreatifitas Renaja Melalui Saka Kencana	Kab Solok	Terlaksananya Pengiriman Kontingen Jambore Saka Kencana	1 Kali	17.850.000	Pertemuan Ajang Kreatifitas Renaja Melalui Saka Kencana	Kab Solok	Terlaksananya Pengiriman Kontingen Jambore Saka Kencana	1 Kali	18.000.000	
<b>13</b>	<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>				<b>14.800.000</b>	<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 200.090.000</b>				<b>14.800.000</b>	
	Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Kab. Solok	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	14 Kecamatan	14.800.000	Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Kab. Solok	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	14 Kecamatan	14.800.000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>6.530.862.785</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>6.767.065.085</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Solok dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Disamping itu Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2020 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Di Indonesia isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk, tingginya angka kematian bayi atau ibu melahirkan, perubahan struktur umur, pergerakan penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan pemangku kepentingannya. Semua itu selain disebabkan oleh cukup banyak faktor yang kompleks, juga mendorong terjadinya berbagai persoalan yang kompleks pula, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Diperlukan kebijakan pembangunan dan kependudukan yang integratif untuk mengendalikan kuantitas dan persebaran serta memperbaiki kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya.

Melalui visi Penduduk Tumbuh Seimbang 2017, pemerintah berkeinginan mengendalikan kuantitas penduduk yang saat ini dirasa sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan jumlah penduduk 366.213 juta jiwa menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Indonesia tidak hanya menduduki ranking empat dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat, tetapi juga memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 1,49 persen per tahun atau dalam hitungan absolut terdapat penambahan sekitar 4 juta jiwa per tahun yang kurang lebih setara dengan jumlah penduduk Singapura pada saat ini. Keinginan ini ditandai dengan penetapan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Renstra Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional Tahun 2010-2014, yakni terkendalinya jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang ditandai *Total Fertility Rate* (TFR) = 2,1 dan *Net Reproduction Rate* (NRR) = 1.

Sudah barang tentu perhatian pemerintah tidak hanya persoalan kuantitas penduduk saja, tetapi juga menyangkut kualitas. Hal ini tercermin dari salah satu misi pembangunan KB saat ini yakni mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya *Millenium Development Goals* (MDGs) yang saat ini belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan.

Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan salah satu Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam banyak hal, perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun masih cukup jauh dari pencapaian kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender merupakan hambatan utama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, meningkatnya keadilan gender merupakan hal yang secara ekonomi masuk akal. Mengarusutamakan masalah-masalah gender ke dalam inisiatif, strategi, kebijakan, sasaran dan target pembangunan memerlukan pengertian menyeluruh atas konteks dinamika gender.



### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan RENJA juga memperhatikan Grand Design Pembangunan Kependudukan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat sesuai isu-isu strategis yang aktual saat ini, tanpa mengabaikan skala prioritas isu-isu terkait yang sesuai dengan kondisi dan situasi Kabupaten Solok saat ini. Penyusunan Rencana Kerja ditujukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Dalam kurun waktu satu tahun kedepan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Rencana Strategis secara keseluruhan.

Penetapan strategi yang akan dilakukan untuk menjawab pelaksanaan program Tahun 2021 dengan terlebih dahulu mengevaluasi dan menganalisis berbagai permasalahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Arah Kebijakan DPPKBP3A Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- **Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi**
  1. Peningkatan Capaian MKJP dan Peserta KB Pria. Penyediaan sarana pendukung pelayanan KB khususnya MKJP diharapkan diadakan berkesinambungan. Untuk itu setiap pelatihan medis IUD dan implan peserta latih juga harus disiapkan sarannya.
  2. Peningkatan Pelayanan dan Dukungan Sarana Prasarana Untuk Daerah Sulit (Galciltas). Strategi yang dilakukan antara lain adalah Pengembangan kebijakan pelayanan KB swasta. Sarana pendukung pelayanan KB swasta perlu diperkuat.
  3. Fasilitasi Kegiatan Pik-Remaja Sebagai Antisipasi Bahaya Narkoba, Hiv-Aids Dan Pergaulan Bebas Dikalangan Remaja

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Keikutsertaan KB Mandiri (Fasilitasi Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat Peserta KB). Perlu ditetapkan definisi peserta KB mandiri: peserta atas biaya mandiri (biaya mandiri di pelayanan swasta atau pemerintah).

- **Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;**

1. Fasilitasi Kegiatan Pertemuan Instusi Masyarakat Pengelola Program KB/KS Ditingkat Nagari, Jorong Dan Korong (PPKBN, PPKBJ Dan Sub PPKBJ) dan Kelompok-Kelompok Kegiatan Lainnya Seperti : BKB, BKR Dan BKL. Termasuk fasilitasi pembinaan kesejahteraan keluarga terutama untuk kelompok paripurna (termasuk pelatihan, penyediaan BKB Kit, BKR Kit, BKL Kit dan kelompok UPPKS)
2. Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelompok-Kelompok Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dalam Masyarakat (Posdaya, Uppks Dan Usaha Kecil Lainnya)
3. Peningkatan Advokasi Dan KIE Di Daerah Galciltas

- **Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

1. Peningkatan Peran P2TP2A Kecamatan Dengan Penyediaan Alokasi Anggaran Yang Memadai
2. Fasilitasi kegiatan yang terkait dengan isu-isu pembangunan gender. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik. Belum terwujudnya, kesetaraan dan keadilan gender ini diperburuk oleh masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Dengan demikian, dilakukan upaya sebagai berikut: peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, termasuk dalam perencanaan dan pengawasan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan dan lembaga-lembaga lainnya.

3. Penanganan Masalah Sosial Perempuan Lanjut Usia Dan Para Penyandang Disabilitas
  4. Sosialisasi Sampai Tingkat Nagari Terkait Dengan Perda Perlindungan Perempuan Dan Anak. Perlindungan perempuan dari kekerasan terhadap perempuan, berkaitan dengan perlindungan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap perempuan termasuk anak, baik dalam keluarga, lingkungan/tempat kerja, atau dalam masyarakat.
  5. Penganggaran Responsif Gender
- **Advokasi, Penggerakan dan Informasi;**
    1. Sistem Pencatatan dan Pelaporan serta penyediaan data dan informasi pembangunan kependudukan dan KB, dan Pemberdayaan perempuan
    2. Penyediaan data basis dan data terpilih
  - **Dukungan Manajemen;**
    - a. Penguatan kelembagaan tingkat kabupaten berdasarkan UU 52 tahun 2009, serta penguatan mekanisme operasional kelembagaan KB di lini lapangan (Pemberdayaan PPLKB/PLKB, IMP, dan Kader KB).

### **3.3. Program Dan Kegiatan**

Rencana kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja tersebut menggambarkan tentang Program dan kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Solok pada Tahun 2021 adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran tahun 2021.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPKBP3A Tahun 2021 yaitu :

- **Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi**

1. Program Pelayanan Kontrasepsi  
Kegiatan : Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB.
2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR  
Kegiatan :
  - a. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja & kelompok sebaya di luar sekolah.
  - b. Penyediaan Sarana Kerja PKB
  - b. Pertemuan Ajang Kreatifitas Remaja melalui Saka Kencana.
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja  
Kegiatan :
  - a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.
  - b. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR yang mandiri  
Kegiatan :
  - a. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB.
  - b. Pendataan Keluarga
5. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR Yang Mandiri  
Kegiatan : Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

- **Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;**

1. Program Keluarga Berencana :  
Kegiatan :
  - a. Pelayanan KIE
  - b. Pembinaan Keluarga Berencana
  - c. Jambore Institusi Masyarakat



2. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga  
Kegiatan : Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga
3. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.  
Kegiatan : Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.

• **Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  
Kegiatan :
  - a. Perumusan Kebijakan Peningkatan Potensi dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik.
  - b. Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  
Kegiatan :
  - a. Penyusunan dan Pengolahan Data Analisa Perspektif Gender.
  - b. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan.
3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  
Kegiatan :
  - a. Pembinaan Organisasi Perempuan.
  - b. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera.
  - c. Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak.
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  
Kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.

Untuk lebih lengkapnya program dan kegiatan beserta kebutuhan dana (pagu indikatif) yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2021**  
**Kabupaten Solok**

**Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Halaman 1

No	Nama Program Dan Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>633.325.085</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>858.105.000</b>
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	1.200.000	APBD		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.605.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBP3A	Tersedianya Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	100%	26.000.000	APBD		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBP3A	Tersedianya Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	100%	40.000.000	APBD		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	1.800.000	APBD		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.500.000
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	30.802.585	APBD		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKBP3A	Tersedianya belanja Cetak dan Penggandaan	100%	14.000.000	APBD		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000.000
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Belanja Alat Listrik dan Elektronik	100%	3.000.000	APBD		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	78.000.000	APBD		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.000.000
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKBP3A	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	100%	33.000.000	APBD		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	37.000.000

	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKBP3A	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah	100%	176.922.500	APBD		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	253.000.000
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	DPPKBP3A	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	228.600.000	APBD		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	200.000.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>357.140.000</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>565.000.000</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKBP3A	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100%	121.420.000	APBD		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBP3A	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	225.720.000	APBD		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	DPPKBP3A	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur	100%	10.000.000	APBD		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	DPPKBP3A	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	-	APBD		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100.000.000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>20.000.000</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>50.000.000</b>
	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	DPPKBP3A	Terselenggaranya peningkatan sumber daya aparatur	1 Tahun	20.000.000	APBD		Peningkatan sumber daya aparatur	50.000.000
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>54.872.950</b>			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>125.000.000</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPPKBP3A	Persentase Monev Kegiatan DPPKBP3A Yang Dilaksanakan	100%	-	APBD		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.000.000
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPPKBP3A	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	8 Dokumen	54.872.950	APBD		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.000.000
<b>5</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>				<b>18.700.000</b>			<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>200.000.000</b>
	Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan jabatan Publik	Kab.Solok	Terlaksananya Pembinaan Kapasitas Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	30 Orang	-	APBD		Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan jabatan Publik	100.000.000
	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SKPD Se-Kab.Solok	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Dengan Kesetaraan Gender pada SKPD	26 SKPD	18.700.000	APBD		Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000

<b>6</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>				-			<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>50.000.000</b>
	Penyusunan dan Pengolahan Data Analisa Perspektif Gender	Kab. Solok	Tersedianya Data Analisa dan Perspektif Gender	1 Dokumen	-	APBD		Penyusunan dan Pengolahan Data Analisa Perspektif Gender	50.000.000
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>				<b>112.240.000</b>			<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>310.000.000</b>
	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak di Daerah	Kab. Solok	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak di daerah	62 Orang	27.240.000	APBD		Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	162.000.000
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Kab. Solok	Terlaksananya Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100%	85.000.000	APBD		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	148.000.000
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>				<b>368.240.000</b>			<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>310.000.000</b>
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab.Solok	Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Organisasi Perempuan	1 Tahun	320.000.000	APBD		Pembinaan Organisasi Perempuan	550.000.000
	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Kab.Solok	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	2 Nagari	21.000.000	APBD		Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	75.000.000
	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Kab.Solok	Terlaksananya Penguatan PUG dan Anak	5 Klaster	27.240.000	APBD		Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	144.650.000
<b>9</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>				<b>3.747.270.000</b>			<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>3.984.220.000</b>
	Pelayanan KIE	Kab Solok	Terlaksananya Pelayanan KIE	14 Kecamatan	81.050.000	APBD		Pelayanan KIE	223.000.000
	Pembinaan Keluarga Berencana	Kab. Solok	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana	14 Balai Penyuluh	3.666.220.000	DAK		Pembinaan Keluarga Berencana	3.666.220.000
	Jambore Institusi Masyarakat	Kab. Solok	Terlaksananya jambore Tingkat kabupaten	14 Kontingen	-	APBD		Jambore Institusi Masyarakat	95.000.000
<b>9</b>	<b>Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</b>				<b>176.000.000</b>			<b>Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</b>	<b>193.600.000</b>
	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Kab Solok	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Bayi dan Anak di Masyarakat	14 Kec	-	APBD		Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	40.000.000
<b>10</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>				-			<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>140.000.000</b>
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Kab. Solok	Terlaksana Advokasi dan KIE KRR bagi Remaja	35 Orang	-	APBD		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	60.000.000
	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Kab. Solok	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Tingkat Kecamatan	14 Kec	-	APBD		Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	80.000.000



<b>11</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>				<b>99.450.000</b>			<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>260.000.000</b>
	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Kab. Solok	Terlaksana pemasangan alkon bagi akseptor KB baru	7.000	99.450.000	APBD		Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	260.000.000
<b>12</b>	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR yang mandiri</b>				<b>199.959.000</b>			<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR yang mandiri</b>	<b>130.000.000</b>
	Pendataan Keluarga	Kab. Solok	Tersedia data basis keluarga yang akurat	1 Dokumen	65.000.000	APBD		Pendataan Keluarga	70.000.000
	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Kab. Solok	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli KB	14 Kelompok	-	APBD		Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	60.000.000
<b>13</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>				<b>1.234.350.000</b>			<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>	<b>1.234.350.000</b>
	Fasilitasi Forum Ppelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Kab. Solok	Terlaksananya Pemilihan Duta Gendre	35 PIK R	13.000.000	APBD		Fasilitasi Forum Ppelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	40.000.000
	Penyediaan sarana Kerja PKB	Kab. Solok	Tersedianya Sarana Kerja PKB	5 Paket	1.124.350.000	DAK		Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.124.350.000
	Pertemuan Ajang Kreatifitas Remaja Melalui Saka Kencana	Kab. Solok	Terlaksananya Pengiriman Jambore Saka Kencana	1 Kali	18.000.000	APBD		Pertemuan Ajang Kreatifitas Remaja Melalui Saka Kencana	70.000.000
<b>14</b>	<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>				<b>350.090.000</b>			<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>	<b>200.000.000</b>
	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Kab. Solok	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	14 Kec	14.800.000	APBD		Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	200.000.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>6.767.065.085</b>			<b>JUMLAH</b>	<b>8.876.325.000</b>



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Sumber dana realisasi tahun anggaran 2021 berasal dari APBD dan APBN yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan tupoksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan dan proposional. Upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis. Dengan mempedomani renstra dan rencana kerja 2021 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah serta dengan melihat pemangku kepentingan lainnya sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan.

Secara umum keberhasilan program KB dan pemberdayaan perempuan telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Solok. Walaupun dengan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan. Penduduk tanpa pertumbuhan atau Net Reproduksi Rate sama dengan satu ( $NRR = 1$ ) akan tercapai bila Total Fertility Rate (TFR) berada pada angka 2,10 sehingga rata-rata kelahiran di Indonesia hanya 2 orang anak. Kondisi ini akan terwujud apabila seluruh keluarga ikut KB dan memakai alat kontrasepsi. Tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran serta kebijakan dari pemerintah yang cukup besar untuk mendukung program dan kegiatan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2021 ini. Semoga terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah Kabupaten Solok.

**Kepala DPPKBP3A**

**ZULFAHMI, SH. MM**  
**Nip. 19660325 199402 1 001**





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Adapun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok tahun 2020 meliputi 15 ( Lima belas ) Program dan 42 ( Empat Puluh Dua ) Kegiatan dengan Nilai Sebesar **Rp.8.636.777.500.- ( Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah )**. Sedangkan sumber pendanaan Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2020 meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk lebih lengkapnya Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut :

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Sumber dana realisasi tahun anggaran 2020 berasal dari APBD dan APBN yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan tupoksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan dan proposional. Upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis. Dengan mempedomani renstra dan rencana kerja 2020 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah serta dengan melihat pemangku kepentingan lainnya sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan.

Secara umum keberhasilan program KB dan pemberdayaan perempuan telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Solok. Walaupun dengan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan. Penduduk tanpa pertumbuhan atau Net Reproduksi Rate sama dengan satu (NRR = 1) akan tercapai bila Total Fertility Rate (TFR) berada pada angka 2,10 sehingga rata-rata kelahiran di Indonesia hanya 2 orang anak. Kondisi ini akan terwujud apabila seluruh keluarga ikut KB dan memakai alat kontrasepsi. Tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran serta kebijakan dari pemerintah yang cukup besar untuk mendukung program dan kegiatan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2020 ini. Semoga terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah Kabupaten Solok.

**Kepala DPPKBP3A**

**ZULFAHMI, SH. MM**  
**Nip. 19660325 199402 1 001**





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sumber dana realisasi tahun anggaran 2020 berasal dari APBD dan APBN yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan tupoksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan dan proposional. Upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis. Dengan mempedomani renstra dan rencana kerja 2020 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah serta dengan melihat pemangku kepentingan lainnya sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan.

Secara umum keberhasilan program KB dan pemberdayaan perempuan telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Solok. Walaupun dengan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan. Penduduk tanpa pertumbuhan atau Net Reproduksi Rate sama dengan satu ( $NRR = 1$ ) akan tercapai bila Total Fertility Rate (TFR) berada pada angka 2,10 sehingga rata-rata kelahiran di Indonesia hanya 2 orang anak. Kondisi ini akan terwujud apabila seluruh keluarga ikut KB dan memakai alat kontrasepsi. Tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran serta kebijakan dari pemerintah yang cukup besar untuk mendukung program dan kegiatan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2020 ini. Semoga terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah Kabupaten Solok.

  
**Kepala DPPKBP3A**  
**ZULFAHMI, SH. MM**  
**Nip. 19660325 199402 1 001**